



GERBANG DIGITAL
PARIWISATA INDONESIA

SATU NEGERI, SATU AKSES

Urgensi Smart Tourism Indonesia dan Relevansi GDP Tripod Model sebagai Kerangka Pilot Strategis Nasional

Pitching kepada DPR RI

Berbasis kajian evidensial, audit dokumen internal, dan validasi sumber otoritatif

Indonesia tidak kekurangan destinasi. Indonesia kekurangan orkestrasi.

Smart tourism perlu dibaca sebagai arsitektur tata kelola, bukan sekadar aplikasi.

221,56 juta

pengguna internet; penetrasi 79,5% pada 2024

#22

peringkat Indonesia pada TTDI 2024; naik dari #36

60,77 juta

pengguna QRIS hingga Februari 2026

Tesis eksekutif

- Pasar wisata, konektivitas digital, dan rel pembayaran menguat.
- Bottleneck yang paling kuat teridentifikasi ada pada integrasi data, interoperabilitas, dan orkestrasi layanan lintas aktor.
- GDP Tripod Model relevan diposisikan sebagai pilot-operating-model yang diuji, bukan klaim final nasional.

Implikasi kebijakan

Fokus kebijakan perlu diperluas dari promosi digital menuju interoperabilitas, tata kelola data, penguatan UMKM, dan pilot berbasis KPI.

Diagnosis nasional: pasar tumbuh, tetapi tata kelola digital pariwisata belum sepenuhnya terorkestrasi.

Hal ini menunjukkan jarak antara digital market readiness dan digital governance readiness.

Gejala nasional yang sudah terlihat

- Wisman Februari 2026 mencapai 1,16 juta kunjungan; wisnus 91,14 juta perjalanan.
Digital rails berkembang cepat, tetapi sistem destinasi, properti, dan pengalaman belum selalu terhubung.
- Sektor membutuhkan pengelolaan real-time, bukan hanya statistik ex-post.
- Di Komisi VII, kebutuhan big data, cloud platform, dan governance hingga tingkat desa telah disorot.

Permintaan besar

BPS: wisman 1,16 juta dan wisnus 91,14 juta pada Februari 2026.

Momentum daya saing

WEF: Indonesia naik dari peringkat 36 ke 22 pada TTDI 2024.

Rel digital menguat

BI: QRIS mencapai 60,77 juta pengguna hingga Februari 2026.

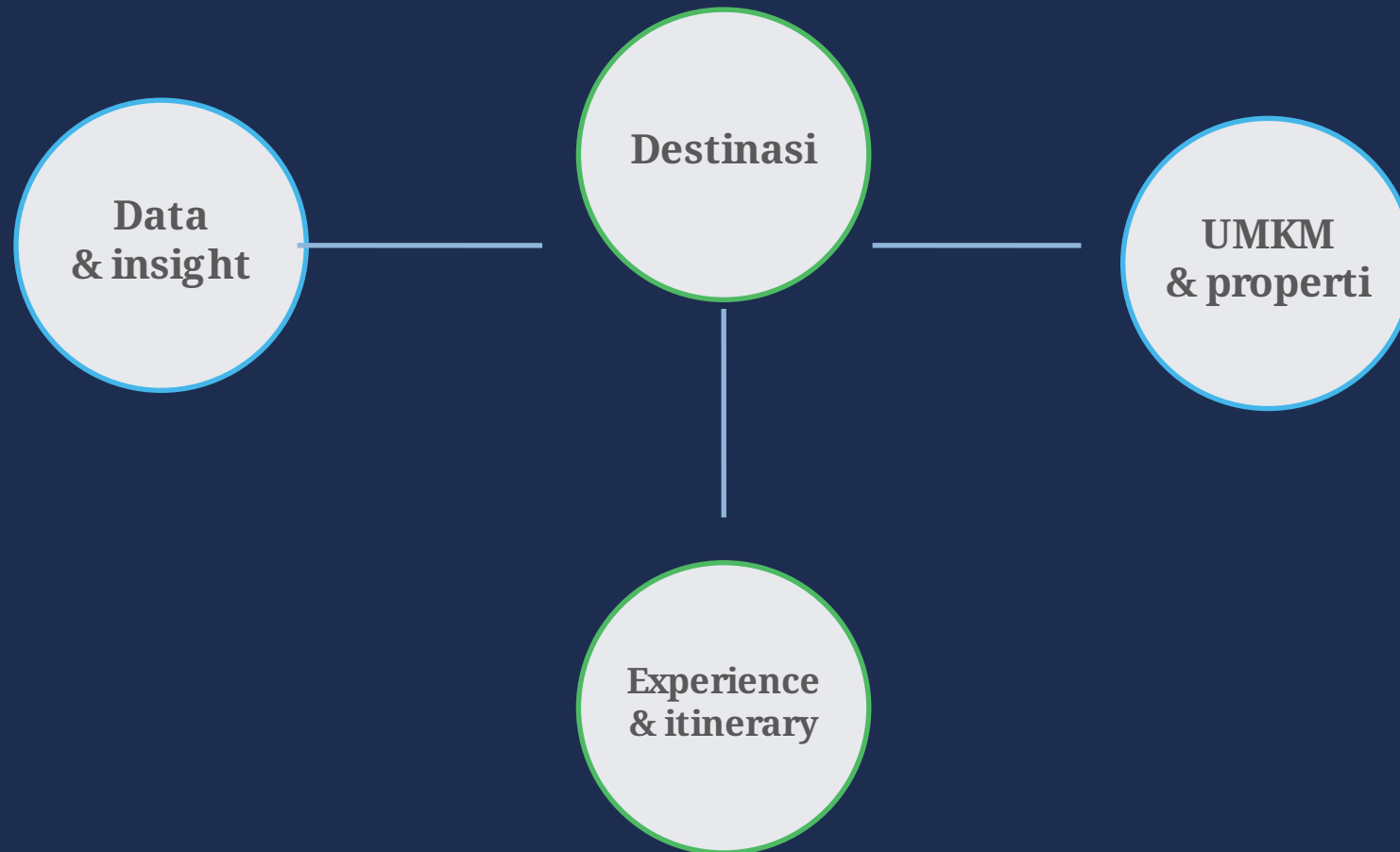
Concern politik yang sudah muncul

Di Komisi VII, Novita Hardini menyoroti kebutuhan big data, cloud platform, dan governance hingga tingkat desa.

Masalah inti: arus data, aktor, dan layanan belum sepenuhnya bekerja sebagai satu sistem operasi pariwisata nasional.

Mengapa pendekatan parsial belum cukup.

Promosi digital, aplikasi, dan dashboard yang berdiri sendiri belum cukup untuk membentuk smart tourism.



Risiko utama dari fragmentasi

- Silo data dan rendahnya visibilitas lintas aktor.
- Manfaat ekonomi lokal lebih sulit ditangkap utuh.
- Personalisasi terbatas saat data, konteks, dan layanan tidak terhubung.
- Pengawasan dan respons kebijakan kurang presisi.

Tanpa orkestrasi, digitalisasi berisiko memindahkan sebagian masalah lama ke medium baru.

Smart tourism perlu dibaca sebagai arsitektur tata kelola.

Dalam deck ini, smart tourism dibaca sebagai tata kelola yang menghubungkan data, layanan, keputusan, dan manfaat publik.

Interface layer | kanal kunjungan, reservasi, pembayaran, informasi wisata

Data layer | interoperabilitas, identitas pelaku, transaksi, preferensi, carrying capacity

Orchestration layer | governance dashboard, rekomendasi, dispatch, analitik real-time

Public value layer | UMKM naik kelas, manfaat lokal lebih merata, pengalaman lebih personal, kebijakan lebih presisi

Dasar kebijakan

- UN Tourism menempatkan smart destination sebagai strategi teknologi, sustainability, accessibility, dan inclusivity.
- Perpres 82/2023 mengutamakan integrasi dan interoperabilitas dalam keterpaduan layanan digital nasional.
- Dengan demikian, smart tourism lebih tepat dipahami sebagai governance architecture, bukan sekadar fitur aplikasi.

GDP menawarkan kerangka national digital gateway for smart tourism.

Kerangka ini tidak dimaksudkan sebagai aplikasi tunggal, melainkan sebagai pintu integrasi operasional dan kebijakan yang layak diuji.

INOVASI

KEBERLANJUTAN

KEDAULATAN DIGITAL

Posisi strategis GDP

- Menghubungkan destinasi, properti, pengalaman, dan pelaku lokal ke dalam satu ekosistem kerja.
- Menjaga lokalitas sebagai basis makna, bukan ornamen promosi.
- Menyediakan jalur uji untuk interoperabilitas, dashboard, dan layanan real-time.

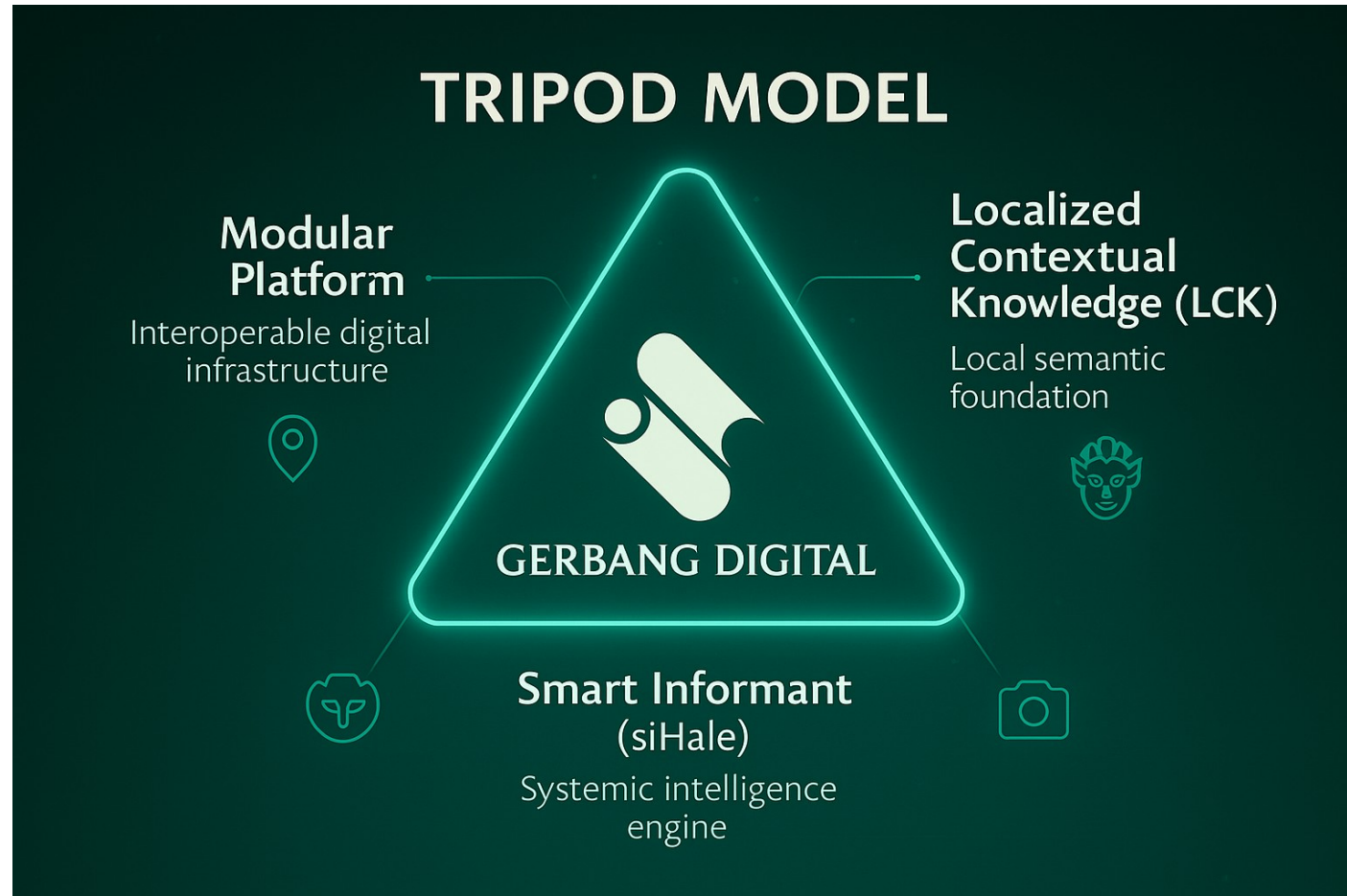


Posisi kebijakan yang defensible

Pilot-operating-model yang dapat diuji pada satu atau beberapa klaster, kompatibel dengan arah integrasi SPBE, penguatan SISPARNAS, dan evaluasi berbasis indikator.

Tripod Model adalah jantung arsitektur GDP.

Tiga simpul ini menjaga keseimbangan antara infrastruktur, makna lokal, dan kecerdasan layanan.



1 Modular Platform

DMS, PMS, dan EMS sebagai infrastruktur operasional yang interoperabel.

2 Localized Contextual Knowledge

Basis semantik lokal: data, narasi, praktik komunitas, dan konteks budaya.

3 Smart Informant | siHale

Orkestrasi NLU, rekomendasi, dan integrasi real-time lintas sistem.

Batas klaim: kuat sebagai arsitektur konseptual; belum boleh diklaim sebagai bukti final nasional tanpa evaluasi independen lintas wilayah.

Empat sistem inti mengubah konsep menjadi operasi.

Setiap sistem menangani problem yang berbeda, namun saling terhubung dalam ekosistem GDP.

SDS

Smart Destination System

Mengelola daya dukung, distribusi pengunjung, dan dinamika spasial destinasi.

SPS

Smart Property System

Mengatur reservasi, inventori, dan performa properti wisata secara digital dan terukur.

SES

Smart Experience System

Mendesain pengalaman personal, segmentasi minat, dan itinerary adaptif.

siHale

Smart Informant

Otak sistem yang menghubungkan data, layanan, dan interaksi bahasa alami.

Operasional

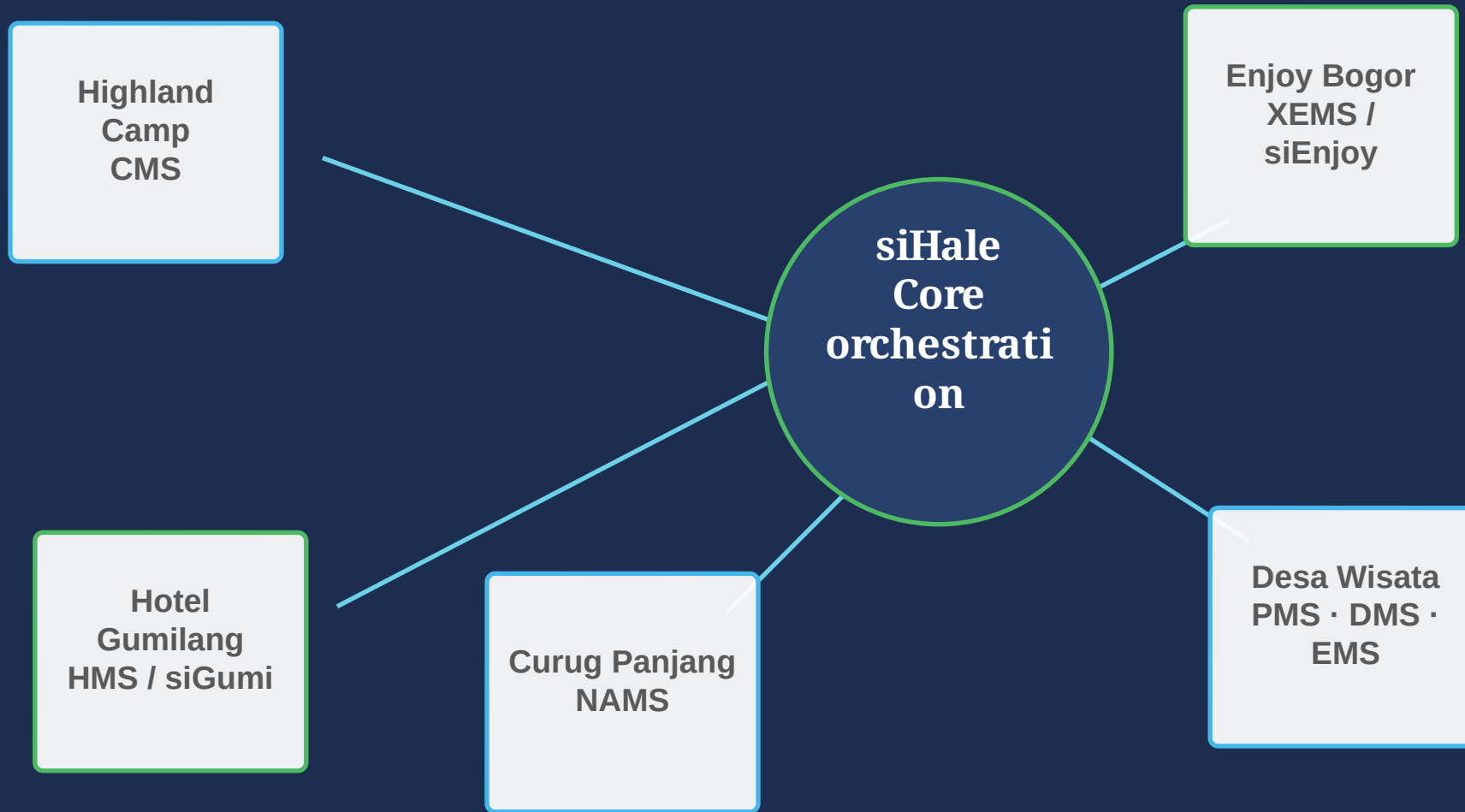
DMS | PMS | EMS menjadi antarmuka layanan; siHale menjadi mesin orkestrasi lintas sistem.

Logika kebijakan

Dengan pembagian fungsi yang jelas, pilot dapat menguji interoperabilitas, pengukuran manfaat lokal, dan respons kebijakan secara modular sebelum scale-up nasional.

Puncak Bogor sebagai logika pilot.

Yang dapat dipertahankan saat ini adalah proof of operability pada satu klaster, bukan bukti final dampak nasional.



Apa yang sudah dapat dibaca

- Proof of operability: model dapat dihubungkan lintas entitas pada satu klaster.
- Proof of impact: masih memerlukan baseline, evaluasi tambahan, dan perbandingan.
- Nilai kebijakan: menyediakan pembelajaran awal sebelum uji yang lebih luas.

Posisi yang defensibel: pilot ini menunjukkan desain dapat dioperasikan pada satu klaster; pembuktian dampak lintas wilayah masih memerlukan evaluasi tambahan.

Nilai publik GDP perlu dibaca dalam bahasa negara.

UMKM, tata kelola, keberlanjutan, lokalitas, dan kedaulatan data adalah bahasa nilai publik yang perlu diuji.

Penguatan UMKM

Akses pasar, reservasi, promosi, dan onboarding digital dapat dibuat lebih terukur.

Tata kelola presisi

Dashboard dan data real-time dapat mendukung keputusan destinasi yang lebih presisi.

Pemerataan manfaat

Arus kunjungan dan rantai nilai lokal berpotensi dikelola lebih merata.

Lokalitas terintegrasi

LCK dirancang untuk menjaga narasi, praktik komunitas, dan konteks budaya di dalam sistem.

Kedaulatan digital

Negara dan daerah dapat memperkuat posisi tawar dalam ekonomi platform melalui tata kelola data yang lebih jelas.

KPI pilot yang perlu diawasi: digitalisasi UMKM, konversi pemesanan, sebaran kunjungan, lama tinggal, kepuasan, dan indikator daya dukung.

Risiko harus diakui sejak awal dan dijawab dengan pengaman institusional.

Kedewasaan model terlihat dari kemampuan mengakui titik rawan dan menyiapkan mitigasi yang dapat diawasi serta diuji dalam pilot.

Risiko utama	Pengaman yang disarankan
Adopsi pelaku rendah	Onboarding bertahap, pendampingan lapangan, dan insentif penggunaan untuk UMKM serta operator lokal.
Kesenjangan dan kualitas data lokal	Protokol kurasi LCK, standar metadata, dan audit kualitas data sebelum scale-up.
Fragmentasi sistem dan vendor lock-in	Standar API terbuka, interoperabilitas wajib, dan pengadaan yang mencegah ketergantungan tunggal.
Keamanan dan privasi	Privacy by design, kontrol akses, audit berkala, dan pelatihan siber bagi operator daerah.

Apa yang dapat didorong DPR sekarang.

Slide ini harus dibaca sebagai agenda kebijakan, bukan permintaan komersial.

- 01 Dorong pilot strategis nasional**

Melalui fungsi pengawasan dan anggaran, DPR dapat mendorong uji pilot pada satu atau beberapa klaster dengan KPI yang diaudit.
- 02 Dorong standar interoperabilitas**

Melalui rapat kerja dan pengawasan, DPR dapat meminta kementerian dan lembaga menyiapkan standar interoperabilitas, pertukaran data, dan privasi yang dapat diawasi.
- 03 Perkuat UMKM dan daerah**

DPR dapat mendorong agar desain pilot memprioritaskan literasi data dan AI, onboarding, serta kemudahan partisipasi pelaku kecil dan pemerintah daerah.
- 04 Pastikan evaluasi dan pengawasan**

DPR dapat meminta baseline, target, pembandingan, audit independen, dan laporan berkala sebelum keputusan scale-up nasional diambil.

Pilot berbasis kinerja | interoperabilitas | prioritas UMKM | evaluasi ketat | Peran DPR: legislasi, anggaran, pengawasan.



GERBANG DIGITAL
PARIWISATA INDONESIA

Smart tourism tidak cukup dijawab dengan lebih banyak aplikasi. Ia membutuhkan orkestrasi nasional yang berpihak pada daerah, UMKM, dan lokalitas Indonesia.

SATU NEGERI, SATU AKSES

GDP Indonesia | Untuk percakapan kebijakan yang lebih terintegrasi, inklusif, dan berkelanjutan.